

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Laurensius P. Sayrani^{1*}, Frans Gana², Rudi Rohi³, Alferd Enamau⁴, Ernestus Holivil⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

laurensiusayrani@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Kupang menghadapi masalah transparansi dan potensi korupsi dalam pengelolaannya, yang berisiko merugikan masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil melalui penguatan soft skill dan hard skill dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program MBG. *Soft skill* yang ditargetkan meliputi kemampuan komunikasi advokatif, kerja kolaboratif, dan kesadaran kritis terhadap tata kelola program, sedangkan *hard skill* mencakup kemampuan analisis kebijakan, identifikasi titik rawan korupsi, pemetaan risiko, serta penyusunan strategi pengawasan berbasis bukti. Metode yang digunakan adalah workshop interaktif dengan simulasi praktis, yang melibatkan mitra Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO'A, dan diikuti oleh 40 peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta survei kepuasan untuk menilai kualitas pelatihan. Pre-test dan post-test masing-masing 10 pertanyaan tertutup berbentuk pilihan ganda/skala penilaian. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta, yaitu peningkatan kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi sebesar 17%, keterampilan pengawasan meningkat 17%, dan mitigasi korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan peningkatan baik dalam *softskill* maupun *hardskill* peserta.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Advokasi Kebijakan; Mitigasi Korupsi; Pengawasan Program Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Sipil.

Abstract: The Free Nutritious Meals Program (MBG) in the Kupang region faces issues of transparency and potential corruption in its management, which risks harming the communities in need. The objective of this community service program is to increase the capacity of civil society by strengthening soft skills and hard skills in policy advocacy and corruption risk mitigation in the MBG Program. The targeted soft skills include advocacy communication skills, collaborative work, and critical awareness of program governance, while hard skills include policy analysis skills, identification of corruption-prone areas, risk mapping, and evidence-based monitoring strategy development. The method used was an interactive workshop with practical simulations, involving partners from the BPJ Committee, HWDI NTT, Bengkel APPeK, and JARPUK INA FO'A, and attended by 40 participants. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests to measure understanding improvement, as well as satisfaction surveys to assess training quality. The pre-test and post-test each consisted of 10 closed-ended questions in the form of multiple choice/rating scales. The results showed a significant improvement in participants' skills, namely a 17% increase in the ability to identify corruption-prone areas, a 17% increase in oversight skills, and a 26% increase in corruption mitigation, indicating an improvement in both the soft skills and hard skills of the participants.

Keywords: Free Nutritious Food Program; Policy Advocacy; Corruption Mitigation; Social Program Monitoring; Civil Society Empowerment.



Article History:

Received: 27-11-2025
Revised : 31-12-2025
Accepted: 03-01-2026
Online : 01-02-2026



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan sosial merupakan masalah global yang sangat mendesak, terutama di negara berkembang. Program sosial seringkali tidak memiliki mekanisme pengelolaan yang transparan, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan sumber daya dan korupsi. Pentingnya pembentukan dewan pengelola multisektoral yang transparan untuk memastikan alokasi dana yang tepat sasaran telah banyak ditekankan, sementara kurangnya transparansi administratif mengurangi efektivitas pengawasan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aivalli et al., 2025; Kokhan, 2025b, 2025a). Tanpa adanya kerangka pengelolaan yang jelas, pengawasan menjadi sangat terbatas, dan risiko penyalahgunaan semakin tinggi.

Program sosial di negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap korupsi karena beberapa faktor, termasuk kelemahan dalam institusi pengawasan dan ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara efektif. Ketidakefektifan kerangka hukum dan prosedur administratif yang tidak konsisten sering kali memfasilitasi penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan (Kokhan, 2025a). Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jika transformasi tata kelola tidak dilakukan, potensi perilaku korupsi akan terus terjadi, sehingga pengelolaan sumber daya sosial tidak akan efektif (Fajri et al., 2023).

Masyarakat sipil memegang peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola program sosial yang transparan dan akuntabel. Pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk membangun budaya integritas, sementara masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi kebijakan dapat meningkatkan kualitas pengawasan sosial, terutama di negara dengan tingkat korupsi tinggi. Masyarakat sipil juga berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat membantu menuntut penerapan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel (Jaafar, 2024; Qin-Liang, 2021; Taufik, 2025). Hal ini memperkuat urgensi untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil agar mereka dapat terlibat secara signifikan dalam pengawasan kebijakan sosial.

Namun, meskipun potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat sipil, mitra dalam kegiatan ini, yaitu Media, Ombudsman, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT, Bengkel APPeK, dan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) INA FO'A, masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas advokasi dan pengawasan mereka. Mitra sering kesulitan dalam mengakses data yang relevan, tidak memiliki kemampuan analisis kebijakan yang memadai, dan kurang memahami titik rawan korupsi dalam program sosial. Organisasi masyarakat sipil sering kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan karena keterbatasan dukungan teknis dan kebijakan pemerintah yang tidak

transparan. Kurangnya inovasi dalam metode advokasi juga berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik secara signifikan (Fajri et al., 2023; Kazanskaia, 2025b; Nipa & Hasan, 2023). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pelatihan advokasi kebijakan, pemetaan risiko korupsi, dan penguatan jejaring kolaboratif, yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang dengan memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil dan memastikan keberlanjutan mekanisme pengawasan publik yang lebih efektif

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan advokasi kebijakan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan publik secara lebih terstruktur. Pelatihan ini memberikan keterampilan untuk membangun jejaring yang kuat, menyusun strategi kampanye yang lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan diri para advokat. Pelatihan tersebut juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, yang pada gilirannya membawa dampak positif pada kualitas pemerintahan. Jejaring multipihak sangat penting dalam advokasi, terutama untuk memperjuangkan kebijakan yang inklusif dengan melibatkan berbagai aktor dari pemerintah hingga sektor swasta (Kazanskaia, 2025a; Omilusi, 2023; Rusfiana & Kurniasih, 2024). Dengan memperkuat jejaring ini, masyarakat sipil dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Dalam konteks pengawasan antikorupsi, masyarakat sipil juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan warga, memperkuat mekanisme pengawasan serta melindungi kepentingan umum. Kompetensi penting yang harus dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan publik berbasis komunitas mencakup keterampilan analisis data, komunikasi strategis, dan kolaborasi dalam jejaring. Pelatihan pemetaan risiko korupsi membantu mereka dalam mengidentifikasi dan mengatasi area yang rentan terhadap penyimpangan dalam program pangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat (Busse et al., 2020; Gesesew et al., 2025).

Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh mitra, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dalam analisis kebijakan, pemahaman titik rawan korupsi, serta kemampuan menyusun strategi pengawasan berbasis bukti. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pembentukan jejaring multipihak yang akan mendukung keberlanjutan advokasi dan pengawasan publik di masa depan. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan

program gizi, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan pelatihan praktis untuk memperkuat pemahaman peserta tentang advokasi kebijakan, pengawasan publik, serta mitigasi risiko korupsi dalam program sosial, khususnya Program Makan Bergizi Gratis. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dasar dan konsep-konsep penting, sedangkan diskusi interaktif dimaksudkan untuk membangun pemahaman kolektif antara peserta. Pelatihan praktis lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan analisis kebijakan, pengawasan, serta pembuatan strategi mitigasi risiko korupsi yang berbasis pada studi kasus nyata. Metode ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara teori dan praktik langsung yang berguna dalam memperkuat kapasitas mitra.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra yang memiliki peran strategis dalam penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi kebijakan. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Media, Ombudsman, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT, Bengkel APPeK, dan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) INA FO'A. Mitra-mitra ini berasal dari berbagai latar belakang dan beroperasi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Oktober 2025, di Gedung Kwarda Pramuka NTT, Kupang, NTT, dan melibatkan 40 peserta, yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing organisasi mitra. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah langkah awal yang sangat penting dalam memastikan kelancaran pelatihan advokasi dengan tujuan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tepat sasaran. Proses ini dimulai dengan penentuan kebutuhan pelatihan, yang dilakukan melalui diskusi antara tim pengabdian dan mitra untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam penerapan teknik advokasi dan pengawasan program sosial. Hasil diskusi ini akan menjadi dasar dalam merancang materi pelatihan yang sesuai dengan kondisi nyata peserta di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan pemilihan instruktur yang memiliki kompetensi di bidang advokasi kebijakan, mitigasi risiko korupsi, serta pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan pelatihan disampaikan oleh para ahli yang berpengalaman. Setelah itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup konsep dasar advokasi kebijakan, strategi kampanye untuk pengawasan publik, serta teknik-teknik mitigasi korupsi dalam program

sosial. Semua persiapan ini disusun untuk memastikan bahwa pelatihan dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kapasitas peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga komponen utama yang dilaksanakan, yaitu workshop interaktif, pendekatan berbasis simulasi, dan diskusi serta berbagi pengalaman. Workshop interaktif dilakukan sebagai metode utama untuk menyampaikan materi secara langsung dan partisipatif. Para peserta dilibatkan secara aktif melalui tanya jawab, studi kasus, dan presentasi kelompok untuk membantu mereka memahami dengan lebih mendalam konsep-konsep advokasi dan pengawasan kebijakan.

Berikutnya, dilakukan simulasi teknik advokasi, di mana peserta akan mempraktekkan cara menyusun kampanye, strategi lobi, dan menggunakan media sosial untuk mengawasi serta mengadvokasi kebijakan publik. Simulasi ini dirancang agar peserta bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata. Pada bagian terakhir, diadakan sesi diskusi dan refleksi, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan, dan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan di komunitas atau lingkungan kerja mereka.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan terdiri dari tiga komponen utama, yakni pre-test, post-test dengan 10 pertanyaan, dan survei kepuasan peserta. Pre-test dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait konsep dan teknik advokasi serta pengawasan. Setelah pelatihan selesai, dilaksanakan post-test untuk menilai sejauh mana peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan yang telah diberikan selama pelatihan.

Selain itu, dilakukan pula survei kepuasan peserta untuk menilai aspek-aspek kualitas pelatihan, seperti materi yang disampaikan, metode pengajaran yang digunakan, dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan peserta. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan pelatihan serta memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kegiatan serupa di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan dengan konteks yang dihadapi oleh peserta. Diskusi ini melibatkan mitra seperti Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO'A, serta tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Nusa Cendana. Berdasarkan diskusi tersebut, diputuskan bahwa pelatihan akan fokus pada advokasi kebijakan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengawasan terhadap potensi korupsi. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang materi yang sesuai dengan kondisi peserta, sehingga pelatihan dapat lebih aplikatif dan berdampak langsung di lapangan (Alexander & Allo, 2021; Carey et al., 2025).

Setelah itu, instruktur yang kompeten dalam bidang advokasi kebijakan dan pencegahan korupsi dipilih, yakni Bapak Ernestus Holivil, Dosen Administrasi Publik di Universitas Nusa Cendana. Beliau memiliki pengalaman dalam membahas isu-isu tata kelola publik dan korupsi dalam program sosial, yang menjadikannya sosok yang tepat untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Persiapan materi pelatihan meliputi konsep dasar advokasi kebijakan, pengawasan program sosial, serta teknik mitigasi korupsi dalam Program MBG (Miller et al., 2023; Warwick et al., 2022).

Setelah pemilihan instruktur, tim pengabdian melanjutkan dengan penyusunan materi pelatihan yang mencakup strategi advokasi kebijakan, pendekatan pengawasan, serta simulasi pengawasan terhadap korupsi. Tujuan dari materi yang disusun adalah memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh peserta dalam menangani potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Persiapan ini dirancang agar pelatihan berjalan lancar dan memberi dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta (Miller et al., 2023; Warwick et al., 2022).

Selain itu, tahap logistik dan fasilitas juga dipersiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Tim memastikan bahwa ruang pertemuan di Gedung Kwarda Pramuka NTT, Kupang telah siap dan dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk presentasi, diskusi interaktif, serta dokumentasi. Semua tahapan persiapan ini dilakukan dengan seksama untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan efektif dan efisien (Carey et al., 2025).

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi dari Bapak Laurensius P. Sayrani dan Bapak Ernestus Holivil, yang membahas tentang aroma korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemateri menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program sosial ini, seperti manipulasi data penerima manfaat, penggelembungan biaya, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG, serta cara-cara untuk memitigasi risiko korupsi, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemateri sedang memberikan pemaparan tentang aroma korupsi dalam program MBG

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan peserta dalam membahas kebijakan MBG yang diterapkan di Kupang. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah korupsi. Setiap peserta diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam program MBG di masa depan. Diskusi ini berjalan sangat produktif, dengan banyak ide yang muncul untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan program, seperti terlihat pada Gambar 2.

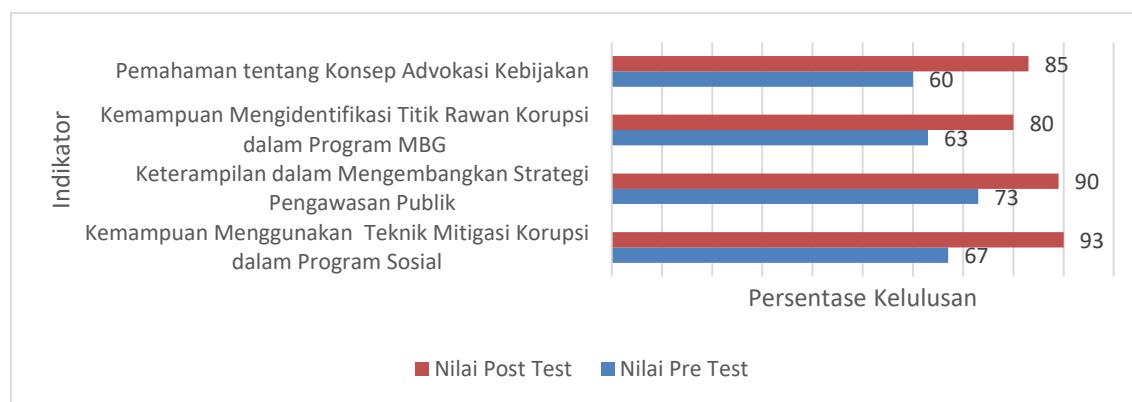


Gambar 2. Diskusi Interaktif bersama Peserta

Pada tahap ini, dilakukan simulasi yang memungkinkan peserta untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk pemetaan risiko korupsi dan pembuatan strategi pengawasan. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diminta untuk menyusun rencana aksi terkait dengan pengawasan program MBG di wilayah mereka. Simulasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mengidentifikasi titik rawan korupsi dan menyusun strategi yang efektif untuk memitigasi potensi penyimpangan. Peserta juga berdiskusi tentang tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta cara mengatasinya.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai konsep advokasi kebijakan, pengawasan program sosial, dan mitigasi korupsi. Berdasarkan hasil pre-test, peserta menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang isu-isu terkait korupsi dalam program MBG. Namun, setelah mengikuti pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Grafik di bawah ini menunjukkan persentase peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan, seperti terlihat pada Gambar 3.

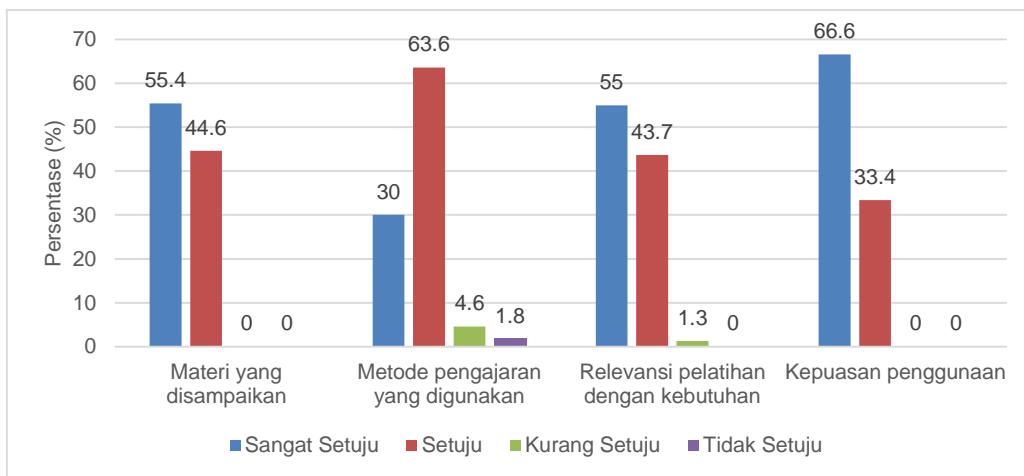


Gambar 3. Persentase Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Gambar 3 di atas menunjukkan Pemahaman tentang konsep advokasi kebijakan meningkat dari 60% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Artinya, peserta mampu memahami peran advokasi dalam pengawasan kebijakan publik. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi titik rawan korupsi dalam program MBG meningkat dari 63% menjadi 80%, yang mencerminkan peningkatan pemahaman mereka mengenai potensi risiko penyalahgunaan dana dan bagaimana cara mengatasinya. Kemampuan dalam mengembangkan strategi pengawasan publik juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 73% pada pre-test menjadi 90% pada post-test, yang menunjukkan bahwa peserta sekarang lebih siap untuk merancang dan melaksanakan strategi pengawasan yang efektif. Terakhir, kemampuan menggunakan teknik mitigasi korupsi meningkat tajam dari 67% menjadi 93%, mengindikasikan bahwa peserta sekarang lebih terampil dalam menerapkan teknik untuk mengurangi potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG.

Evaluasi lanjutan dilakukan dengan survei kepuasan peserta, yang bertujuan untuk menilai kualitas pelatihan dari sudut pandang peserta. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka, dan mereka merasa lebih siap untuk menerapkan strategi advokasi dan pengawasan di lapangan. Beberapa peserta memberikan umpan balik positif mengenai interaksi dengan instruktur dan pentingnya simulasi praktis yang dilakukan. Namun, beberapa peserta juga menyarankan agar lebih banyak waktu diberikan

untuk praktik lapangan dan pembahasan kasus-kasus nyata, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Pelatihan

Sebagian besar, sebagaimana digambarkan dalam grafik di atas, peserta mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka, dengan 55,4% peserta menyatakan sangat setuju dan 44,6% menyatakan setuju. Peserta juga memberikan umpan balik positif mengenai metode pengajaran yang digunakan, dengan 63,6% peserta sangat setuju bahwa metode pengajaran yang interaktif dan berbasis simulasi sangat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, 55% peserta sangat setuju bahwa pelatihan ini relevan dengan tantangan yang mereka hadapi dalam mengawasi Program MBG, dan 66,6% peserta sangat setuju bahwa mereka merasa puas dengan pelatihan ini dan siap untuk menerapkannya dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta, sekaligus memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengawasan dan mitigasi korupsi dalam program sosial. Hasil survei kepuasan menunjukkan bahwa peserta merasa puas dengan kualitas materi, metode, dan relevansi pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk mengawasi dan mencegah korupsi dalam program sosial seperti MBG.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Peningkatan pemahaman peserta tercermin dalam hasil post-test, dengan kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi yang meningkat sebesar 17%, keterampilan mengembangkan

strategi pengawasan publik meningkat 17%, dan kemampuan mitigasi korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan progres yang sangat baik dalam peningkatan soft skill dan hard skill peserta. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang dapat diberikan adalah untuk melakukan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan serupa di bidang lain yang relevan, seperti pengawasan kebijakan publik di sektor kesehatan atau pendidikan, serta melakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji efektivitas jangka panjang dari pelatihan advokasi dalam mencegah korupsi. Selain itu, program pelatihan ini juga dapat diperluas dengan menyediakan alat praktis dan sumber daya yang lebih mudah diakses oleh masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap program-program publik di berbagai daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada mitra atas kerja sama dan partisipasinya selama pelaksanaan pelatihan advokasi ini. Ucapan terima kasih juga kepada Universitas Nusa Cendana yang telah mendukung penuh kegiatan ini, serta kepada seluruh instruktur yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam pelatihan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti setiap sesi pelatihan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sukses. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aivalli, P., Dada, S., Gilmore, B., Srinivas, P. N., & Brún, A. D. (2025). Power Dynamics and Intersectoral Collaboration for Health in Low- And Middle-Income Countries: A Realist Review. *Health Policy and Planning*, 40(6), 661–683. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaf022>
- Alexander, Apryl A, & Allo, Hailey. (2021). Building a Climate for Advocacy Training in Professional Psychology. *The Counseling Psychologist*, 49(7), 1070–1089. <https://doi.org/10.1177/001110000211027973>
- Bigham, B. L., Lavelle, C. L. B., Hulme, J., & Hayman, K. (2020). MP26: The Simulated Newsroom: A Novel Educational Intervention to Teach Advocacy Skills to Resident Physicians. *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 22(S1), S51–S52. <https://doi.org/10.1017/cem.2020.174>
- Busse, H., Covic, N., Aakesson, A., & Jogo, W. (2020). What Is the Role of Civil Society in Multisectoral Nutrition Governance Systems? A Multicountry Review. *Food and Nutrition Bulletin*, 41(2), 244–260. <https://doi.org/10.1177/0379572119877348>
- Carey, A., Tibbs, M., Warren-Perry, A., Petrie, N., Kathryn, S., McCrum, S., & Duffy, J. (2025). Amplify and Advocate: Implementing a Youth Mental Health Advocacy Project, a Collaborative Rights-Based Approach Using COM-B, APEASE, and the Lundy Model. *Journal of Community Psychology*, 53(3), e70009. <https://doi.org/10.1002/jcop.70009>

- Dodson, N. A., Talib, H. J., Gao, Q., Choi, J., & Coupey, S. M. (2020). Pediatricians as Child Health Advocates: The Role of Advocacy Education. *Health Promotion Practice*, 22(1), 13–17. <https://doi.org/10.1177/1524839920931494>
- Fajri, H., Halawa, H. S., & Wahyuni, N. (2023). Non-State Actor's Strategy in Advocating the Movement to Reject Development Policy. *Journal of Public Administration Studies*, 8(2), 10–17. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.02.2>
- Gesesew, H. A., Kebede, H. K., Baum, F., Ward, P., & Musolino, C. (2025). Civil Society and Perilous Medicine in Africa: A Systematic Review. *BMJ Global Health*, 10(6), e018541. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-018541>
- Holivil, E., Pane, B., Narang, N. H. Z., Arpin, R. M., Kholikin, R. A., Radja, A. K., & Mushlih, M. A. H. (2025a). Pelatihan Literasi Digital Dan Aplikasi Augmented Reality Untuk Pembelajaran Kreatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(2), 2082–2092.
- Holivil, E., Pane, B., Narang, N. H. Z., Arpin, R. M., Kholikin, R. A., Radja, A. K., & Mushlih, M. A. H. (2025b). Peningkatan Keterampilan Advokasi Mahasiswa Dalam Memperjuangkan Perubahan Sosial. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(3), 2874–2885.
- Jaafar, K. (2024). The Impact of Political Corruption on Social Welfare Policy: A Systematic Review of Malaysia's Welfare System and Political Financing. *Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, 12, 33–44. <https://doi.org/10.58618/igdiriibf.1593043>
- Kazanskaia, A. N. (2025a). *Capacity Building in Developing Countries: Foundations, Practices, and Implications for Sustainable Development*. Neya-GJNPS. <https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-capacity-building-2025>
- Kazanskaia, A. N. (2025b). *Nonprofit Organisations and Policy Influence in Contemporary Governance*. Neya-GJNPS. <https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-pblplcpwinfdsmk-09>
- Kokhan, O. I. (2025a). Analysis of the Problem of Preventing and Counteracting Corruption in the Social Sphere in Contemporary Legal Science. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1, 465–469. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.77>
- Kokhan, O. I. (2025b). Problems of Implementing Anti-Corruption Policy in the Social Sphere. *Uzhhorod National University Herald Series Law*, 3(87), 51–55. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.3.7>
- Miller, C. C., Xiao, M., Lay, D. J., Miley, S. N., Vanderford, N. L., & Ickes, M. J. (2023). The impact of a virtual tobacco prevention and advocacy training among youth in Appalachian Kentucky communities. *Tobacco Use Insights*, 16, 1179173X221150747. <https://doi.org/10.1177/1179173x221150747>
- Nipa, M. N., & Hasan, M. (2023). The Role of Civil Society in Promoting Good Governance: A Qualitative Inquiry Into Bangladesh's Experience. *Socio Economy and Policy Studies*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.26480/seps.02.2023.91.97>
- Omilusi, M. (2023). Two Decades of Civil Society Activism and Advocacy: Navigating the Labyrinth of the Development and Security Agenda in Southwestern Nigeria. *The Making of Contemporary Maldives Isolation Dictatorship and Democracy*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.52823/sgfa2182>
- Qin-Liang, Y. (2022). The Influence of Civil Society on Welfare Expansion in East Asia: A Comparative Study of Singapore and South Korea. *Politikon: The IAPSS Journal of Political Science*, 52, 30–63. <https://doi.org/10.22151/politikon.52.2>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>

- Taufik, T. (2025). Public Legal Awareness in Combating Corruption. *Jurnal Pendidikan Ips*, 15(3), 847–851. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3507>
- Truong, J., Sandhu, P., Sheng, V., Sadeghi, Y., Leung, F. H., Wright, R., & Suleman, S. (2023). Advocacy in community-based service learning: perspectives of community partner organizations. *Canadian medical education journal*, 14(1), 90-94. <https://doi.org/10.36834/cmej.74887>
- Warwick, S., Kantor, L., Ahart, E., Twist, K., Mabry, T., & Stoltzfus, K. (2022). Physician Advocacy: Identifying Motivations for Work Beyond Clinical Practice. *Kansas Journal of Medicine*, 15(3), 433–436. <https://doi.org/10.17161/kjm.vol15.18255>
- Winter, L. A., Wood, M., & Shriberg, D. (2025). Practitioner Psychologists as Policy Advocates, or Policy as Outside of Our Scope? Experiences and Views of Training in School and Counseling Psychology. *School Psychology International*, 46(2), 153–171. <https://doi.org/10.1177/01430343241305385>